



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PERAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN
PERKAWINAN (BP4) DALAM MENGURANGI TINGKAT
PERCERAIAN DI KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
KABUPATEN ROKAN HULU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk mengikuti Ujian Oral
Comprehensive Strata I Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Oleh :

VIKI RAHMAT ILLAHI
11575104925



PROGRAM S.1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

PEKANBARU

2019

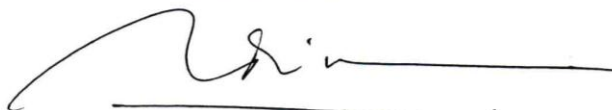
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : VIKI RAHMAT ILLAHI
NIM : 11575104925
FAKULTAS/JURUSAN : Ekonomi dan Ilmu Sosial / Administrasi Negara
JUDUL SKRIPSI : PERAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN
DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)
DALAM MENGURANGI TINGKAT
PERCERAIAN DI KECAMATAN KUNTO
DARUSSALAM KABUPATEN ROKAN HULU

**DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING**



Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos. M.Soc. Sc
NIK. 1307171018

MENGETAHUI:

DEKAN

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

KETUA JURUSAN

Administrasi Negara



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : VIKI RAHMAT ILLAHI
NIM : 11575104925
FAKULTAS/JURUSAN : Ekonomi dan Ilmu Sosial / Administrasi Negara
JUDUL SKRIPSI : PERAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN
DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)
DALAM MENGURANGI TINGKAT
PERCERAIAN DI KECAMATAN KUNTO
DARUSSALAM KABUPATEN ROKAN HULU
HARI/TANGGAL UJIAN : Jumat / 27 September 2019

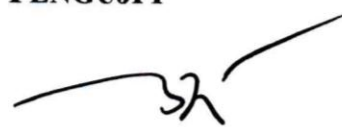
PANITIA PENGUJI

KETUA



Drs. Almasri, M.Si
NIP: 19670801 200501 1 007

ANGGOTA :

PENGUJI I


Muslim, S.Sos, M.Si
NIP. 19820205 201503 1 002

PENGUJI II


Mhd. Rafi, S.Sos, M.Si
NIK. 130 717 059



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PERAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENGURANGI TINGKAT PERCERAIAN DI KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM KABUPATEN ROKAN HULU

Oleh : Viki Rahmat Illahi
11575104925

Tingginya angka perceraian menunjukkan bahwa rumah tangga masyarakat islam masih memerlukan pembinaan dalam usaha mewujudkan rumah tangga bahagia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mengurangi Perceraian di Kecamatan Kunto Darussalam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara mewancarai key informan yang terdiri dari Satu orang pihak KUA Kunto Darussalam, Satu orang dari pihak BP4 Kunto Darussalam dan Delapan orang Masyarakat yang pernah dan sedang mendapatkan penyuluhan BP4. Data di analisis dengan cara melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Kunto Darussalam dalam mengurangi tingkat perceraian adalah memberikan bimbingan, penyuluhan, penasihat, dan konseling mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok. Faktor penghambat BP4 Kunto Darussalam dalam melakukan tugas adalah keterbatasan tempat dan waktu sehingga kurang mendapatkan informasi tentang program atau tugas BP4, tidak adanya kerjasama dan koordinasi bersama Pengadilan Agama, dan kurang nya keseriusan pemerintah untuk mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Kunto Darussalam.

Kata kunci : Peran BP4, Mengurangi perceraian, Kunto Darussalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Astaghfirullahaladzim

Tiada kata paling bermakna, pantas, layak dan utama yang terucap selain syukur kepada Illahi Robbi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Zat Yang Maha Sempurna pencipta kesempurnaan, Yang Maha Pemurah, Pencurah Rahmat, Yang Maha Pengasih Pengikat Cinta dan Kasih Sayang. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi Pengampunan terhadap hamba-Nya yang melampaui batas dan atas kebesaran-Nya, ia tetap melimpahan rahmat-Nya.

Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam. Sebagai suri tauladan terbaik sepanjang zaman, seorang pemuda padang pasir yang baik akhlaknya, dan sosok pemimpin yang paling berpengaruh sepanjang sejarah kepemimpinan.

Penulisan skripsi ini merupakan kewajiban bagi penulis untuk memenuhi sebagian prasyarat untuk menamatkan studi, guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Dengan segala kerendahan hati, penulis sadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan dan kelemahan yang tidak lain hanyalah karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang penulis miliki.

Disamping itu juga, tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ayah dan Emak tercinta yang telah berjuang keras membebaskan penulis dari jurang kebodohan. Perhatian serta senantiasa mendo'akan dalam menuntut ilmu agar dimudahkan. Abang dan Adek-adek tercinta Ardi Kurniawan, M. Jefri Maulana dan ratu dalam Keluarga Intan Rosmiati Putri mereka adalah pelepas tawa dikala jauh.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA Riau beserta staf yang telah memberikan fasilitas dan sarana dalam proses perkuliahan.
3. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau, Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III yang telah memberikan banyak bantuan bagi penulis dalam mengikuti perkuliahan di Jurusan Administrasi Negara.
4. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara yang telah membantu penulis hingga sampai penulisan Skripsi.
5. Bapak Candra Jon Asmara, S.sos, M.Si selaku Penasehat Akademik yang telah menjadi penasehat terbaik pengganti orang tua dan meluangkan waktu pemikirannya untuk penulis.
6. Bapak Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc. Sc selaku Dosen Pembimbing sosok yang bertanggung jawab dan sumber inspirasi yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi untuk penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Seluruh Dosen dilingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau yang telah bekerja sangat keras untuk membekali ilmu pengetahuan kepada mahasiswa khusus nya penulis.
8. Sahabat-sahabat kontrakan C3 Ardi Yahya, S.Sos, Ahmad Junaidi, S.Sos, Sahrul Ilham, S.Sos dan adinda Asyabirin kita susah senang bersama.
9. Sahabat “Pujangga”, penyemangat dalam keraguan dengan tingkah laku kebodohan yang bikin rindu.
10. Keluarga besar “Ana 2015” dan Lokal “Ana A 2015” yang saya sayangi karena Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
11. Keluarga besar “Reginiti” dan “Rialdi” teman sesyurga dan Risa,Yosa pengobat hati yang galau.
12. Keluarga KKN Sialang Bungkok 2018 singkat, menarik, asyik dan rindu.
13. Almamater Tercinta UIN SUSKA Riau.
14. Bagai tangguhnya kapal di tengah lautan tanpa batas dan tujuan. Engkau adalah pelabuhanku.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari apa yang di harapkan, sehingga memerlukan penyempurnaan sedemikian rupa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

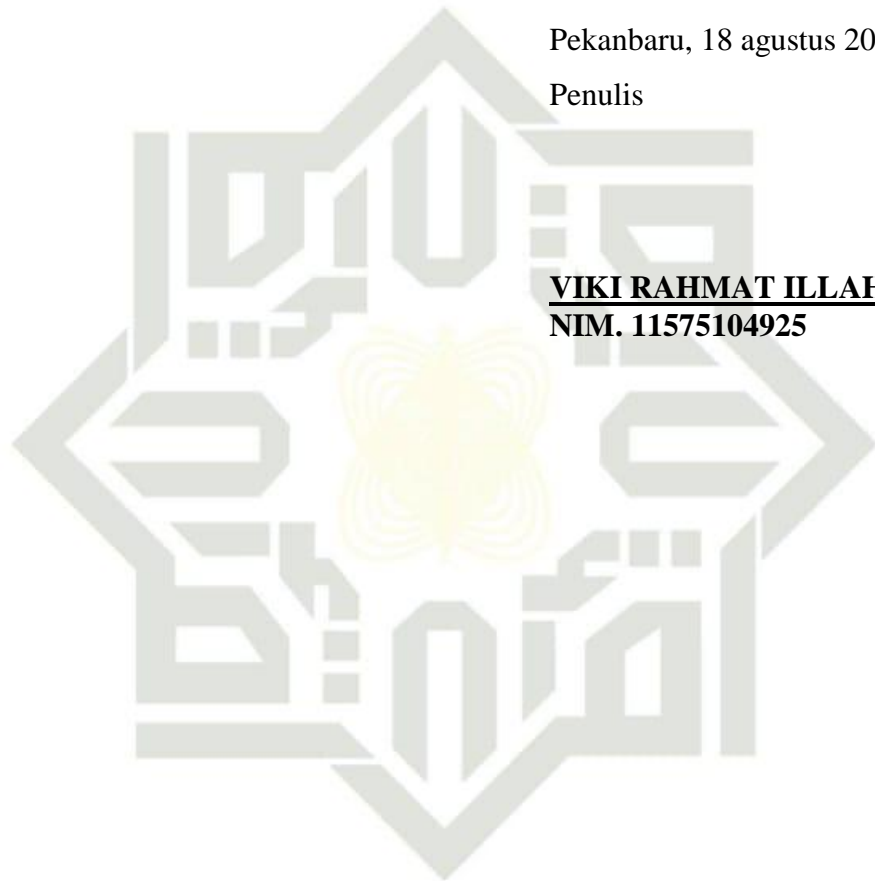
Akhir nya atas segala bantuan semua pihak, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besar nya, semoga semua ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Amiin ya rabbal'alamin.

Pekanbaru, 18 agustus 2017

Penulis

VIKI RAHMAT ILLAHI
NIM. 11575104925



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	9

BAB II : LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Peran	11
2.2 Konsep Pelayanan.....	12
2.3 Pelayanan Publik.....	15
2.4 Hubungan Administrasi Negara Dengan Ilmu Agama	17
2.5 Pengertian Perkawinan	18
2.6 Pengertian Perceraian	19
2.7 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian	22

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Tugas Pokok dan Fungsi BP4 (Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan).....	24
2.9 Pandangan Islam Terhadap Perceraian	26
2.10 Definisi Konsep	29
2.11 Penelitian Terdahulu.....	30
2.12 Konsep Operasional.....	34
2.13 Kerangka Pemikiran	36

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Waktu Penelitian.....	37
3.2 Jenis Penelitian dan Sumber Data.....	37
3.2.1 Data Primer.....	38
3.2.2 Data Sekunder	38
3.3 Informn Penelitian	39
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.4.1 Observasi	40
3.4.2 Wawancara	40
3.4.3 Dokumentasi	41
3.5 Metode Analisis Data.....	41

BAB V : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Karakteristik Wilayah	43
4.2 Keadaan Demografi	43
4.2.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Kunto Darussalam.....	43
4.2.2 Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	45

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.3 Mata Pencarian Penduduk	46
4.2.4 Kehidupan Keagamaan.....	47
4.3 Struktur Pemerintahan	49
4.3.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan.....	49
4.4 Struktur Organisasi Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017	55
4.5 Sejarah Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Kunto Darussalam	56
4.6 Visi Dan Misi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Kunto Darussalam	58
4.7 Kegiatan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Kunto Darussalam	59
4.8 Program Kerja Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Kunto Darussalam	59
4.9 Struktur Organisasi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Kunto Darussalam	63

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Peran BP4 Kecamatan Kunto Darussalam.....	64
5.1.1 Memberikan Bimbingan Keluarga	65
5.1.2 Penyuluhan Pranikah	72
5.1.3 Penasihat Keluarga	81
5.1.4 Konseling Keluarga	88
5.2 Hambatan	95

BAB VI : PENUTUP

6.1 Kesimpulan	98
6.2 Saran	100

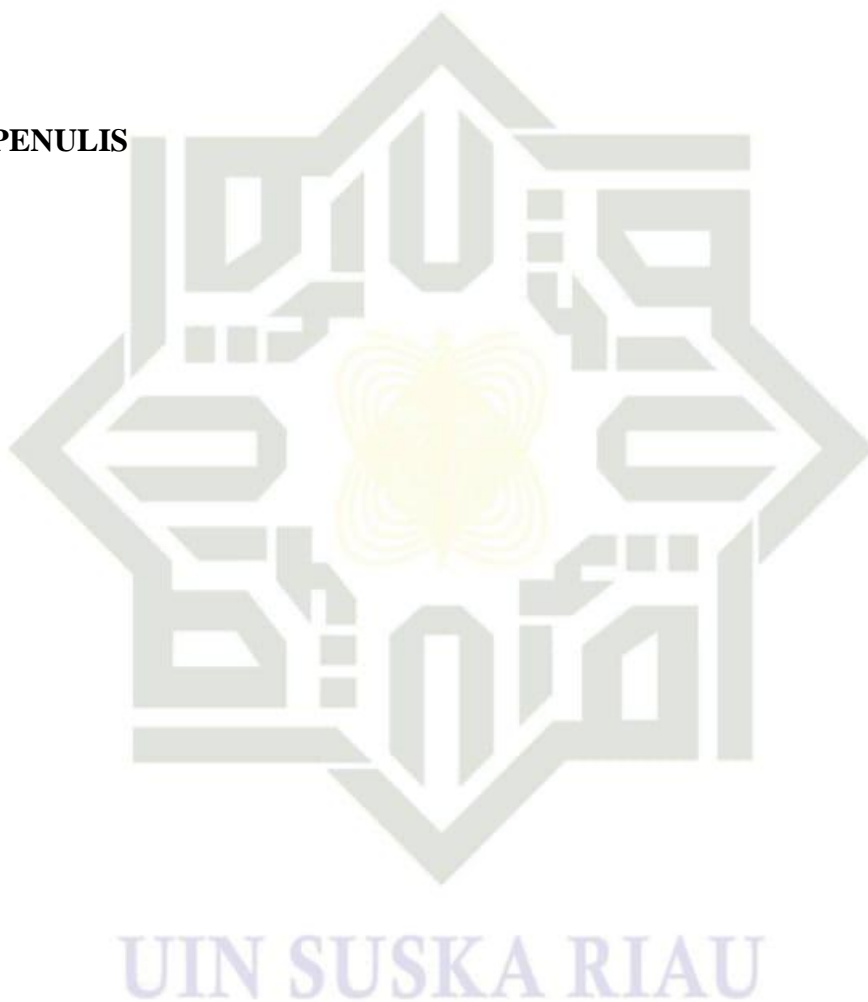
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABEL

Table 1.1 : Data Perkawinan & Perceraian di Kabupaten Rokan Hulu pada Tahun 2016-2018	6
Table 1.2 : Data Perkawinan & Perceraian di Kecamatan Kunto Darussalam pada Tahun 2016-2018.....	6
Table 2.1 : Konsep Operasional	34
Table 3.1 : Key Informan Penelitian.....	39
Table 4.1 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Kunto Darussalam pada Tahun 2017	44
Table 4.2 : Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan di Kecamatan Kunto Darussalam pada Tahun 2017	45
Table 4.3 : Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Kunto Darussalam pada Tahun 2017	46
Table 4.4 : Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kecamatan Kunto Darussalam pada Tahun 2017	46
Table 4.5 Jumlah Pemeluk Agama di Kecamatan Kunto Darussalam pada Tahun 2017	48
Table 4.6 Jumlah Sarana Ibadah di Kecamatan Kunto Darussalam pada Tahun 2017	48
Table 5.1 Data Pasangan Yang Di Berikan Bimbingan Januari - September 2019-2016.....	71
Table 5.2 Data Pasangan Yang Di Berikan Penyuluhan Penataran Januari - September 2019-2016.....	80
Table 5.3 Data Pasangan Yang Di Berikan Penasihatn Januari – September 2019-2016.....	87
Table 5.4 Data Memberikan Penataran Perkawinan dan Rumah Tangga yang Melapor Januari-September 2019-2016	94
Table 5.5 Persentase Perceraian di Kecamatan Kunto Darussalam Tahun 2016-2018.....	95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran.....	37
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017	56
Gambar 4.2 : Struktur Organisasi Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Kecamatan Kunto Darussalam	64



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal. Tanpa perkawinan kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya. Sebab Allah SWT, telah menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan. Kehidupan bersuami istri yang dibangun melalui lembaga perkawinan, sesungguhnya bukan semata-mata dalam rangka penyaluran hasrat biologis. Maksud dan tujuan perkawinan itu jauh lebih luas dibandingkan sekedar hubungan seksual. Bahkan apabila ditinjau dari sudut religius.

Perkawinan dimaksudkan untuk melahirkan keturunan demi keberlanjutan kehidupan ummat manusia di atas permukaan bumi ini. Dapat dibayangkan, kalau tidak ada perkawinan, maka jumlah manusia tidak akan bertambah. Bahkan sebaliknya mengalami pengurangan-pengurangan hingga pada akhirnya punah ditelan masa. Pentingnya maksud dan tujuan perkawinan maka setiap orang berhak melaksanakannya dengan niat dan ikhlas semata-mata hendak mengabdikan kepada Allah SWT. sebab, sebagaimana perbuatan-perbuatan atau aktivitas-aktivitas lainnya, hasil sangat ditentukan oleh niat yang menyertainya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada hakekatnya perkawinan itu adalah salah satu bentuk pengabdian (ibadah) kepada Allah SWT. Setiap keluarga tentu mendambakan terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, yakni keluarga yang tenang, bahagia, harmonis, penuh cinta dan kasih sayang. Untuk mewujudkannya tidak semudah membalik telapak tangan, akan tetapi membutuhkan pengorbanan dan kerjasama yang baik. Keluarga seperti itu tidak mungkin akan tercapai tanpa adanya kebersamaan peranan seluruh keluarga di dalam rumah tangga. Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak, masing-masing memiliki peranan yang sangat besar.

Sebagai Negara yang memiliki azas hukum yang berdaulat tentunya Negara Indonesia sendiri telah membuat peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang tertuang dalam pasal 1 yaitu perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Islam Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. 11/491 Tahun 2013 Badan Penasihatannya Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disebut BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat social keagamaan sebagai mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warohmah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Organisasi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tidak dilandasi dengan dasar hukum Undang-undang atau peraturan pemerintah pada awalnya, melainkan tumbuh dan berkembang dari masyarakat sehingga memperoleh pengukuhan serta pengawasan dari pemerintah. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya maka telah diatur mengenai organisasi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), yaitu dalam:

- A. Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 Jo Nomor 30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) pusat.
- B. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- C. PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- D. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sangat erat dengan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Mahkamah Syariah Keterkaitan yang itu adalah :

1. Menjaga keutuhan rumah tangga dan keluarga sakinah.
2. Mendamaikan kedua belah pihak.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tugas dan fungsi diatas menggambarkan fungsi dari Badan Penasihatn Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) agar menasehati kedua suami istri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah tangga.

Provinsi Riau juga merupakan salah satu daerah yang menjalankan peraturan tersebut yang dikeluarkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia salah satunya di Kabupaten Rokan Hulu melalui Kementrian Agama yang terletak di kabupaten tersebut.

Berdasarkan data yang didapatkan, jumlah perkawinan dan perceraian di Kabupaten Rokan Hulu yaitu pada tahun 2016 sebanyak 3.256 perkawinan dan 675 kasus perceraian, tahun 2017 sebanyak 3.842 perkawinan dan 755 kasus perceraian, di tahun 2018 sebanyak 3.605 perkawinan dan 858 kasus perceraian. Banyak nya jumlah perkawinan dan perceraian di Kabupaten Rokan Hulu tentunya sudah menjadi tanggung jawab pemerintah melalui Badan Penasihatn Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan yang ada di kecamatan menjadi pelindung dan menjaga keutuhan rumah tangga dan memberikan pembinaan keluarga sakinah.

Secara terstruktur BP4 berkedudukan dibawah Kementerian Agama, dengan pusat di ibu kota Jakarta dan berada di provinsi sampai tingkat kecamatan Badan Penasihatn Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan adalah lembaga mitra Kementerian Agama yang berwilayah di kecamatan bertugas membantu dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan melalui penasihatn, pembinaan, dan pelestarian perkawinan. Untuk

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan tugas dan fungsinya sebagai organisasi yang berkomitmen dalam mewujudkan mutu perkawinan dengan menekan angka perceraian Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) juga bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Analisisdaily (Medan) – Memberitakan BKKBN Sumut Gelar Orientasi Program KKBPK Bagi Petugas BP4 KUA. “Melalui kegiatan ini, kami berharap petugas BP4 KUA tidak hanya memberikan nasihat kepada calon pengantin bagaimana membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, namun juga dapat memberikan pemahaman program KKBPK kepada calon pengantin agar bisa mengkampanyekan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), usia menikah ideal 21 tahun wanita dan 25 tahun pria”. Jadi pada dasarnya Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) itu dibentuk karena meningkatnya angka perceraian dan labilnya perkawinan yang disebabkan oleh kurangnya peran petugas NTR (Nikah Talak Rujuk) dalam kasus perceraian dan kurang efektifnya Pengadilan Agama dalam mempersulit terjadinya perceraian

Selanjutnya kecamatan Kunto Darussalam juga merupakan daerah yang memiliki jumlah perkawinan dan perceraian yang cukup banyak dari tahun ketahun. Pada tahun 2016 jumlah perkawinan sebanyak 227 perkawinan dan 83 kasus perceraian, selanjutnya pada tahun 2017 sebanyak 297 perkawinan dan 72 kasus perceraian, pada tahun 2018 sebanyak 234 perkawinan dan 90 kasus perceraian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adanya Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Rokan Hulu Kecamatan Kunto Darussalam, ternyata masih adanya permasalahan yang terjadi dalam perkawinan salah satunya perceraian. Berikut data perkawinan dan perceraian di Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 1.1 Data Perkawinan & Perceraian di Kabupaten Rokan Hulu pada Tahun 2016-2018

No	Tahun	Jumlah Perkawinan	Jumlah perceraian	Persentase Perceraian
1	2016	3256	675	20,73 %
2	2017	3842	755	19,65 %
3	2018	3605	858	23,80 %

Sumber : Kementrian Agama Rokan Hulu & Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Tahun 2019

Selanjutnya pada Kecamatan Kunto Darussalam sendiri merupakan daerah yang memiliki jumlah perceraian yang cukup besar.

Berikut data perkawinan dan perceraian di Kecamatan Kunto Darussalam:

Tabel 1.2 Data Perkawinan & Perceraian di Kecamatan Kunto Darussalam pada Tahun 2016-2018

No	Tahun	Jumlah Perkawinan	Jumlah perceraian	Persentase Perceraian
1	2016	227	83	36,56 %
2	2017	297	72	24,24 %
3	2018	234	90	38,46 %

Sumber : Kementrian Agama Rokan Hulu & Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Tahun 2019

Perceraian merupakan terputus nya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan kewajiban nya sebagai suami istri. Kata cerai bukan berarti hanya menyangkut kedua belah pihak pasangan saja, yaitu ayah dan ibu. Sayangnya, tidak banyak dari pasangan yang memperhatikan bagaimana dan apa yang sedang terjadi pada anak ketika proses perceraian akan berlangsung. Kadangkala, perceraian adalah satun-satunya jalan bagi orangtua untuk dapat terus menjalani kehidupan sesuai yang mereka inginkan. Namun apapun alasan nya, perceraian selalu menimbulkan akibat buruk pada anak, meskipun dalam kasus tertentu perceraian dianggap merupakan alternatif terbaik dari pada membiarkan anak tinggal dalam keluarga dengan kehidupan pernikahan yang buruk. Adapun hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perceraian yang disampaikan oleh bapak Burhanuddin staf administrasi (PANITERA) Pengadilan Agama Pasir Pengaraian mengatakan bahwa:

1. Masalah pertengkaran 80% dengan beberapa kasus terdapat didalam nya, Narkoba, tidak ada tanggung jawab, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pihak ketiga (yang dimaksud adalah mertua, saudara, selingkuh, nikah sirih).
2. Pelanggaran taklik talak 15% yaitu istri gugat cerai suami.
3. Penyebab lain nya 5% yaitu menyangkut masalah orang murtad, cacat fisik, tidak dapat melayani hubungan badan.

Dalam hal ini dapat disimpulkan permasalahan perceraian sudah seharusnya menjadi kewajiban Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan (BP4) untuk menjaga keutuhan rumah tangga di tengah masyarakat.

Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian dilingkungan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu , terutama dengan focus penelitian yaitu **“Peran Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan paparan pada latar belakang masalah yang diatas, maka penelitian ini dibatasi dan dirumuskan dalam beberapa pokok masalah, yaitu :

1. Bagaimana Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Kunto Darussalam dalam mengurangi tingkat perceraian di kecamatan Kunto Darussalam?
2. Apa saja faktor yang menghambat pelaksanaan tugas Badan Penasihataan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Kunto Darussalam?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Kunto Darussalam.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat pelaksanaan tugas Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Kunto Darussalam.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara akademik, penelitian ini dimasukan sebagai sumbangsih akademik dalam penelitian sosial.
2. Secara praktisi, penelitian ini dapat dijadikan kontribusi dan sumbangan pemikiran untuk pembentukan keluarga yang sakinah.
3. Sebagai bahan perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan menjadi bahan berpikir guna untuk mengoptimalkan ilmu pengetahuan yang akan dilanjuti oleh peneliti lainnya.
4. Memberikan sumbangan teoritik-konseptual terhadap perkembangan pendidikan keluarga, khususnya pendidikan pra nikah dan pasca nikah yang berlandaskan nilai-nilai keislaman.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini maka perlu ditentukan sistematika penulisan yang baik. Sistematika penulisan nya adalah sebagai berikut :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini mendeskripsikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penelitian.

Bab II Landasan Teori

Berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian perancangan dan pembuatan sistem.

Bab III Metode Penelitian

Dalam BAB ini diuraikan berbagai hal diantaranya : sampel penelitian, tempat penelitian, metode pengumpulan data, model penelitian definisi variabel, dan pengujian hipotesis.

Bab IV Gambaran Umum Objek Penelitian

Pada BAB ini diuraikan diantaranya berbagai hal, diantaranya : sejarah singkat obyek tempat penelitian yaitu di kabupaten Rokan Hulu, struktur organisasi dan uraian tugas atau lebih jelasnya SOP

Bab V Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang mencakup kinerja peran dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian dan Perkawinan (BP4) Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu.

Bab VI Kesimpulan dan Saran

Merupakan BAB penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis tentang kajian yang dimaksud.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

Pengertian Peran

Peran menurut Soekanto (2009:212-213) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Di menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Levison dalam soekanto (2009:213) mengatakan peran mencakup tiga hal, antara lain:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam msyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang didapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai prilaku individu yang penting bagi struktur social masyarkat.

Menurut Merton (2007:67) mengatakan bahwa peran didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang di harapkan masyarakat dari orang yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (roleset). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh seorang yang menduduki status-status social khusus.

Pengertian peran diambil dari dunia teater. Dalam teater seorang actor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan didalam sebagai tokoh di harapkan untuk perilaku tertentu (Sarwano, 2002 : 209).

Bidlder and Thimas Sarwono, (2001 : 209) mengemukakan bahwa ada empat teori peran :

- a. Orang yang mengambil bagian dalam interaksi social.
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut.
- c. Kedudukan orang dalam perilaku.
- d. Kaitan nya dengan orang dalam posisi.

2. Konsep Pelayanan

Istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya menolong menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia (Sinambela, 2010:3). Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung (Moenir, 2006:16-17).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Membicarakan pelayanan berarti membicarakan suatu proses kegiatan yang konotasinya lebih kepada hal yang abstrak (Intangible). Pelayanan adalah merupakan suatu proses, proses tersebut menghasilkan suatu produk yang berupa pelayanan, yang kemudian diberikan kepada pelanggan.

Beberapa pakar yang memberikan pengertian mengenai pelayanan diantaranya adalah Moenir (Harbani Pasolong, 2007:128). Harbani Pasolong (2007:4), pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan.

Hasibuan mendefinisikan pelayanan sebagai kegiatan pemberian jasa dari satu pihak ke pihak lain, dimana pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dilakukan secara ramah tamah dan dengan etika yang baik sehingga memenuhi kebutuhan dan kepuasan bagi yang menerima.

Menurut Kotler dalam Sampara Lukman (2000:8) mengemukakan, pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu 15 kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Selanjutnya Sampara Lukman (2000:5) pelayanan merupakan suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.

Menurut Ahmad Batinggi (1998:21) terdapat tiga jenis layanan yang bisa dilakukan oleh siapapun, yaitu :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Layanan dengan lisan

Layanan dengan lisan dilakukan oleh petugas - petugas di bidang Hubungan Masyarakat (HUMAS), bidang layanan Informasi, dan bidangbidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang memerlukan. Agar supaya layanan lisan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, ada syarat - syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku layanan yaitu:

- a. Memahami masalah - masalah yang termasuk ke dalam bidang tugasnya.
- b. Mampu memberikan penjelasan apa yang diperlukan, dengan lancar, singkat tetapi cukup jelas sehingga memuaskan bagi mereka yang memperoleh kejelasan mengenai sesuatu.
- c. Bertingkah laku sopan dan ramah.

2. Layanan dengan tulisan

Layanan melalui tulisan merupakan bentuk layanan yang paling menonjol dalam melaksanakan tugas. Sistem layanan pada abad Informasi ini menggunakan sistem layanan jarak jauh dalam bentuk tulisan.

Layanan tulisan ini terdiri dari 2 (dua) golongan yaitu, berupa petunjuk Informasi dan yang sejenis ditujukan kepada orang - orang yang berkepentingan, agar memudahkan mereka dalam berurusan dengan instansi atau lembaga pemerintah. Kedua, layanan berupa

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

reaksi tertulis atau permohonan laporan, pemberian/ penyerahan, pemberitahuan dan sebagainya. Adapun kegunaannya yaitu :

- a. Memudahkan bagi semua pihak yang berkepentingan
 - b. Menghindari orang yang banyak bertanya kepada petugas
 - c. Mamperlancar urusan dan menghemat waktu bagi kedua pihak, baik petugas maupun pihak yang memerlukan pelayanan
 - d. Menuntun orang ke arah yang tepat
3. Layanan dengan perbuatan

Pada umumnya layanan dalam bentuk perbuatan dilakukan oleh petugaspetugas yang memiliki faktor keahlian dan ketrampilan. Dalam kenyataan sehari - sehari layanan ini memang tidak terhindar dari layanan lisan jadi antara layanan perbuatan dan lisan sering digabung. Hal ini disebabkan karena hubungan pelayanan secara umum banyak dilakukan secara lisan kecuali khusus melalui hubungan tulis yang disebabkan oleh faktor jarak.

2.3 Pelayanan Publik

Dalam suatu lembaga pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian (melayani) keperluan perorangan atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Barata (2003 : 11) dalam konsep pelayanan, dikenal dua jenis pelaku pelayanan, yaitu penyedia layanan dan penerima layanan. Penyedia layanan atau service provider adalah pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada masyarakat, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang atau jasa. Sedangkan penerima layanan atau service receiver adalah pelanggan atau masyarakat yang menerima layanan dari para penyedia layanan.

Pelayanan publik menjadi sorotan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelayanan publik memiliki tiga makna, (1) perihal atau cara melayani (2) usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan atau uang (3) kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa.

Menurut Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2007 : 4-5) pengertian pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan BUMN atau BUMD, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Moenir (2010 : 16) menyatakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Berdasarkan peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2016 pasal 1 ayat 1

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

2.4 Hubungan Adiministrasi Negara dengan Ilmu Agama

Administrasi adalah suatu kegiatan kerja sama antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara rasional untuk mencapai tujuan tertentu yang positif. Administrasi atau dikenal sekarang adalah administrasi publik atau public administration adalah suatu proses mengelola kepentingan-kepentingan atau masalah masyarakat/publik. Proses ini mencakup 3 hal mendasar : formulasi (perumusan/pembuatan) kebijakan, implementasi (pelaksanaan) kebijakan dan evaluasi (penilaian) terhadap perumusan dan pelaksanaa kebijakan tersebut dilapangan.

Formulasi menghasilkan norma-norma atau aturan yang harus dilaksanakan atau di implementasikan oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk juga sipembuat kebijakan. Isi dari kebijakan yang dibuat ini tentunya akan menuntun kepada kemajuan sosial dan menjaga tata tertib masyarakat kalau ia merujuk kepada kebenaran, keadilan, dan nilai-nilai lainnya. Karena itu proses administrasi selalu menuntut pertanggung jawaban etis (etika). Etika yang sangat mempengaruhi adalah agama. Dalam agama banyak sekali norma-norma dan nilai yang harus dipatuhi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ilmu administrasi negara merupakan phenomena masyarakat modern dengan objek materialnya adalah manusia yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yang mengandung banyak sifat ilmu sosial dalam metode studinya.

2.5 Pengerian Perkawinan

Menurut Muhmmad Idris Waluyo, (2004:16) perkawinan itu merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat. Selaian itu, sebagai alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya: *pertama*, cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu, yaitu dengan akad nikah dan rukun atau syariat tertentu. *Kedua*, cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya, yaitu dengan prosedur talak.

Menurut Bachtiar (2004), Perkawinan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan. Perkawinan itu merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing-masing pihak untuk hidup bergaul guna memelihara kelangsungan manusia di bumi.

Menurut pengertian yuridis perkawinan ialah ikatan dan lahir dan bathin antra seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, perkawinan merupakan perikatan keagamaan, karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir dan bathin sebagai suami istri dengan tujuan yang suci dan mulia yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa itu mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiriah atau jasmaniah, tetapi juga unsur batiniah atau rohaniah.

2.6 Pengertian Perceraian

Perceraian menurut bahasa putus ikatan hubungan rumah tangga (suami, istri), pisah, terpisah, perpisahan.

Perceraian menurut Gunarsa (1999;90) pilihan yang paling menyakitkan bagi pasangan suami dan istri, namun demikian perceraian bisa menjadi pilihan terbaik yang bisa membuka kan jalan bagi kehidupan yang membahagiakan. Perceraian mengakibatkan status seseorang laki-laki sebagai suami maupun status seseorang perempuan sebagai istri akan berakhir, namun perceraian tidak lah menghentikan status mereka masing-masing sebagai ayah dan ibu terhadap anak-anak yang telah dilahirkan.

Perceraian adalah cerai hidup atau perpisahan hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku (Erna, 1999). Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.

Perceraian menurut UU perkawinan. Percerian terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga. Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan definisi mengenai secara khusus. Pasal 39 ayat (20) UU Perkawinan serta penjelasannya secara jelas menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan. Definisi perceraian di Pengadilan Agama itu, dilihat dari putus nya perkawinan. Putus nya perkawinan di UUP dijelskan, yaitu:

1. Karena kematian
2. Karena perceraian
3. Karena putus nya pengadilan

Perceraian adalah salah satu sebab bubar nya suatu perkawinan, yang di dalam UU No. 1 Tahun 1974 disamping asas monogamy, perceraian mendapat tempat tersendiri, karena kenyataannya didalam masyarakat, perkawinan sering kali terjadi berakhir dengan perceraian yang begitu mudah. Dibeberapa daerah di Indonesia, angka perceraian meningkat, sebelum rancangan UU perkawinan berhasil diundangkan (Soimin, Soedharyo, SH : 2010).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perceraian perceraian secara yuridis berarti putus nya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki-bini (suami-istri) (Dr. Syrifuddin, Muhammad : 2014).

Berikut ini Standar Operasional dari Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yaitu :

1. Kutipan akta nikah asli dan fotocopy,
2. Membawa KTP asli dan fotocopy,
3. Mengantar surat pengantar dari Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Dinas atau instansi bersangkutan,
4. Membawa foto 3x4 2 lembar,

Bentuk pelayanan Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) terhadap pasangan bercerai :

1. Konsultasi
2. Mediasi
3. Kursus Pranikah dan Calon Pengantin

Berikut cara-cara mengatasi perceraian :

1. Cari sumber masalah yang dapat menyebabkan perceraian dan selesaikan dengan baik-baik,
2. Intropeksi diri masing-masing,
3. Jangan memperbesar masalah,
4. Saling menjaga komunikasi dengan baik.



Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perceraian

Menurut Dariyo (2003:160), perceraian merupakan titik puncak dari pengumpulan berbagai permasalahan yang menumpuk beberapa waktu sebelumnya dan jalan terakhir yang harus ditempuh ketika hubungan perkawinan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Faktor Penyebab Perceraian:

- a. Ketidaksetiaan salah satu pasangan hidup. Keberadaan orang ketiga memang akan mengganggu kehidupan perkawinan. Bila diantara keduanya tidak ditemukan kata sepakat untuk menyelesaikan dan tidak saling memaafkan, akhirnya 14 perceraianlah jalan terbaik untuk mengakhiri hubungan pernikahan itu.
- b. Tekanan kebutuhan ekonomi keluarga, Harga barang dan jasa yang semakin melonjak tinggi karena faktor krisis ekonomi negara yang belum berakhir, sementara itu gaji atau penghasilan pasangan dari suami sehingga hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Agar dapat menyelesaikan masalah itu, kemungkinan seorang istri menuntut cerai dari suaminya.
- c. Tidak mempunyai keturunan juga dapat memicu permasalahan diantara kedua pasangan suami dan istri, guna menyelesaikan masalah keturunan ini mereka sepakat untuk mengakhiri pernikahan itu dengan bercerai.
- d. Perbedaan prinsip hidup dan agama.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sulistiyawati (dalam Putri Novita Wijaya, 2008: 28). Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian adalah:

1. kurangnya kesiapan mental,
2. permasalahan ekonomi,
3. kurangnya komunikasi antar pasangan,
4. campur tangan keluarga pasangan,
5. perselingkuhan

George Levinger (Ihromi, 1999:153-155) pada umumnya perceraian itu terjadi karena faktor-faktor tertentu yang mendorong suami- istri untuk bercerai. Faktor-faktor dimaksud antara pasangan suami-istri yang satu dengan yang lain saling berbeda. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan pada tahun 1966 dengan mengambil sampel 600 pasangan suami-istri yang mengajukan perceraian menunjukkan bahwa keluhan-keluhan yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Pasangannya sering mengabaikan kewajibannya terhadap rumah-tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan.
- b. Masalah keuangan yang tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga.
- c. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan.
- d. Pasangan sering membentak dan mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakitkan.
- e. Tidak setia lagi, seperti mempunyai kekasih lain.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangannya, seperti sering menolak dan tidak bisa memberikan kepuasan.
- g. Sering mabuk.
- h. Adanya keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangannya.
- i. Seringnya muncul kecurigaan, kecemburuan serta ketidakpercayaan dari pasangannya.
- j. Berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurang perhatian dan kebersamaan di antara pasangan.
- k. Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya sering menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi dan dirasakan terlalu "menguasai".

2.8 Tugas Pokok dan Fungsi BP4 (Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan badan atau lembaga yang salah satu tugas dan fungsinya adalah mendamaikan suami isteri yang bersengketa atau berselisih dan memberikan nasehat atau bimbingan sebelumnya bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.

BP4 berfungsi sebagai mitra dari KUA dan PA, dimana hubungan ketiganya bersifat paralel. Adapun keterkaitan KUA dengan PA adalah dalam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal jabatan kepala KUA yang merangkap langsung sebagai ketua BP4 Kecamatan. Kemudian data perkawinan yang tercatat dalam buku register dikirim ke Pengadilan Agama, bagi anggota masyarakat yang akan mengajukan talak atau cerai Pengadilan Agama mudah untuk meneliti data yang sebenarnya. Pengadilan Agama mengirim tembusan kepada Kantor Urusan Agama setempat. Sedangkan hubungan antara BP4 dengan PA adalah apabila BP4 mendapatkan pasangan klien yang tidak bisa didamaikan, kedua belah pihak baik suami dan istri sepakat untuk melakukan perceraian, maka BP4 membuat berita acara ke Pengadilan Agama, yang tembusannya kepada Kantor Urusan Agama.

Sedangkan tugas-tugas dari BP4 adalah:

1. Memberikan nasehat penerangan dan tuntunan kepada yang berkepentingan mengenai masalah Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk (NTCR)
2. Mengadakan upaya-upaya yang dapat memperkecil jumlah perceraian.
3. Memberikan bantuan moril dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan hubungan kerumah tangga secara umum.



2.9 Pandangan Islam Terhadap Perceraian

Perceraian memang tidak dilarang dalam agama islam, namun Allah membenci sebuah perceraian. Bercerai adalah jalan terakhir ketika terjadi permasalahan dan saat semua cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, namun tetap tidak ada perubahan. Sebelum perceraian kita mengenal istilah talak. Talak ialah terurainya ikatan nikah dengan perkataan yang jelas.

Sebagaimana Allah SWT berfirman tentang dasar hukum perceraian talak : QS Al-Baqarah 2 : 229

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ مُّطَافِئَاتُكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَانَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)

Artinya :

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

Di dalam ayat Alquran yang lain menjelaskan, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا
تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya :

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan jangan mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru". (QS Ath Thalaq:1)

Kebolehan meminta cerai atau menceraikan itu di gariskan dalam fiqih islam. Demikian pula terhadap seorang istri boleh meminta cerai kepada suaminya dengan syarat yang telah ditetapkan dalam syariat islam yaitu ; gila, berpenyakit kusta, berpenyakit supak, alat kelamin nya impoten tidak memberikan tanggung jawab nafkah lahir dan bathin dan meninngalkan istrinya tanpa ada alasan. Ketentuan fiqhiyah ini merupakan solusi yang mat manusiawi, sebagai agama yang mulia, islam tidak menghendaki pemeiliknya hidup menderita. Bisa kita bayangkan betapa menderitanya seorang suami yang istrinya tidak memberikan pelayanan seksual.

Islam sebagai suatu agama yang tidak menyukai adanya suatu pemaksaan baik dalam hal beragama maupun dalam hal perkwinan, sehingga apabila pasangan suami istri sudah tidak bisa bersatu untuk mencapai tujuan cita-cita perkawinannya maka dengan keadilan Allah di buka suatu jalan keluar yaitu dengan perceraian, meskipun perceraian merupakan hal yang paling di benci Allah, namun perceraian ini merupakan hal yang lebih baik di bandingkan apabila perkawinan yang sudah tidak ada kecocokan lebih mendatangkan kesengsaraan mereka.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10 Definisi Konsep

Definisi konsep dalam penelitian di gunakan agar tidak terjadi kesalahan persepsi dalam pemahaman terhadap tulisan, dimana disitulah batasan-batasan pengertian konsep yang digunakan untuk pembahasan ini.

1. Peran adalah sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu.
2. Perkawinan adalah suatu perjanjian perikatan antara seorang pria dengan wanita yang diakui secara sah oleh masyarakat, hukum maupun agama dan mengandung seperangkat hak dan kewajiban suami istri dalam peranan baru yang dijalani, serta bertujuan membentuk keluarga. Terwujud nya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah.
3. Perceraian adalah terputus nya ikatan perkawinan antara pria dan wanita sebagai suami dan istri yang sah dimata hukum dan agama. Menurut KUH Perdata pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang. Oleh karena itu perlu dipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab akibat yang mungkin timbul setelah suami-istri perkawinannya putus.
4. BP4 adalah Organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan instansi terkait lain dalam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

upaya meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi keluarga muslimin di seluruh Indonesia. Bertujuan untuk mempertinggi perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera materi dan spiritual.

2.11 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian, hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan untuk membantu mendapat gambaran kerangka berfikir, disamping untuk dapat mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian dan factor-factor penting lainnya yang dapat dijadikan sebagai landasan kajian untuk dapat mengembangkan wawasan berfikir peneliti, dimana peneliti mengambil penelitian terdahulu yaitu pada :

1. Jurnal oleh Haris Hidayatulloh dan Laily Hasan dengan berjudul, **“Eksistensi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam mewujudkan keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang 2016”**. Dengan kesimpulan bahwa a. lembaga BP4 di KUA peterongan tidak berperan sesuai dengan fungsinya, Secara struktural badan tersebut masih ada di dalam salah satu unsur yang terdapat di lembaga Kantor Urusan Agama (KUA). b. pasca

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

reformas BP-4 sudah tidak lagi berfungsi dan kebanyakan masyarakat langsung menyelesaikan permasalahannya ke Pengadilan Agama (PA).

2. Jurnal oleh Zahrotul Hamidah dengan berjudul, **“Peran Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Klojen Kota Malang) 2019”**. Dengan kesimpulan bahwa a. bahwa angka perceraian di wilayah KUA Kecamatan Klojen Kota Malang mengalami peningkatan, terbukti dengan adanya data di sepanjang tahun 2017 tercatat ada 18 pasangan cerai, sedangkan di tahun 2018 dari bulan Januari Maret terdapat 17 pasangan cerai. B. peran BP4 dalam hal pelayanan konsultasi, mediasi dan advokasi perkawinan sebagai bentuk upaya untuk meminimalisir angka perceraian di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang namun hasilnya kurang begitu maksimal. C. hambatan yang dialami oleh BP4 diantaranya: 1) Tidak terbukanya salah satu pihak dari klien. 2) Salah satu pihak dari klien tidak bersedia untuk di hubungi dan dimintai keterangan. 3.) Adanya perubahan regulasi pemerintah, 4) Sikap klien yang bersikukuh untuk bercerai. 5) Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan BP4.
3. Jurnal oleh Zuhri dengan berjudul, **“Peranan BP4 Dalam Mengendalikan Perceraian Di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Kab. Gresik 2016”**. Dengan kesimpulan bahwa a. Peranan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BP4 Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Kabupaten Gresik dari Tahun ke Tahun nampak kurang berhasil. B. Belum maksimalnya peranan BP4 Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Kabupaten Gresik dalam mengendalikan perceraian. C. beberapa hambatan yang dihadapinya hal ini meliputi antara lain. 1) Dana yang masih sangat terbatas jumlahnya. 2) BP4 belum ditangani secara maksimal oleh pengurus karena merupakan tugas sampingan dari tugas pokoknya dan belum ditopang dengan dana serta personil yang memadai dan perundang-undangan yang mengikat. 3) Keterbatasan konsultan yang dimiliki baik kualitas maupun kuantitasnya. 4) Klien yang datang ke BP4 belum ada kesadaran untuk konsultasi memecahkan masalah keluarganya, tetapi mereka telah mempunyai motif yang kuat untuk cerai, karena masalah yang dihadapinya sudah berat, dalam arti sudah sulit untuk damai lagi. 5) Adanya perundang-undangan yang memungkinkan para Klien untuk dapat langsung ke Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalahnya.

4. Jurnal oleh Wildana Setia Warga Dinata dengan berjudul, **“Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember 2015”**. Dengan kesimpulan bahwa a. dalam mekanisme pembentukan keluarga sakinah yang dilakukan oleh Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan (BP4) menggunakan beberapa upaya yaitu Upaya Preventif dan Upaya Kuratif. Upaya Preventif dilakukan ketika pasangan tersebut belum menikah. Sedangkan Upaya Kuratif dilakukan ketika pasangan tersebut telah melangsungkan pernikahan.

B. Efektifitas Peran Badan Penasihatn, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dari 127 responden menunjukkan hasil yang sangat signifikan antara sebelum dan sesudah intervensi yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Puger dengan memberikan pemahaman tentang pengetahuan keluarga sakinah yaitu t hitung lebih besar dari t tabel ($5,309 > 1,979$) pada $df = 126$ dan $\alpha = 0,05$ berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya secara statistik ada perbedaan antara sebelum dan sesudah dilakukan pembinaan keluarga sakinah yang dilakukan oleh Badan Penasihatn, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

5. Jurnal dari Nurlia Zulfatun Nisa dengan berjudul, **“Peran Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Kasus Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipayung Jakarta Timur 2013”** yang menarik sebuah kesimpulan yaitu bahwa Peran BP4 Kec. Cipayung sangat penting dan dibutuhkan dalam memberi bantuan terhadap masyarakat dengan cara mengikuti mediasi agar permasalahan yang ada didalam rumah tangga dan keinginan untuk bercerai dapat di cegah.



2.12 Konsep Operasional

Konsep operasional dari penelitian ini adalah:

Tabel 2.1

Konsep Operasional

Variabel Penelitian	Indikator	Sub Indikator
Peran BP4 Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian	1. Memberikan bimbingan	1. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berpekerja 2. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, dan perselisihan rumah tangga
	2. Penyuluhan	1. Menyelenggarakan kursus pra nikah, catin penataran atau pelatihan yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga 2. Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga
	3. Penasehatan	1. Menyelenggarakan kursus pranikah, pendidikan keluarga untuk peningkatan nilai-nilai keimanan 2. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah
	4. Konseling	1. Menyelenggarakan seminar dan kegiatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sejenis dengan perkawinan

2. Memberikan arahan dan solusi dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian

Sumber: Keputusan Musyawarah Nasional BP4 XV Tahun 2014

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

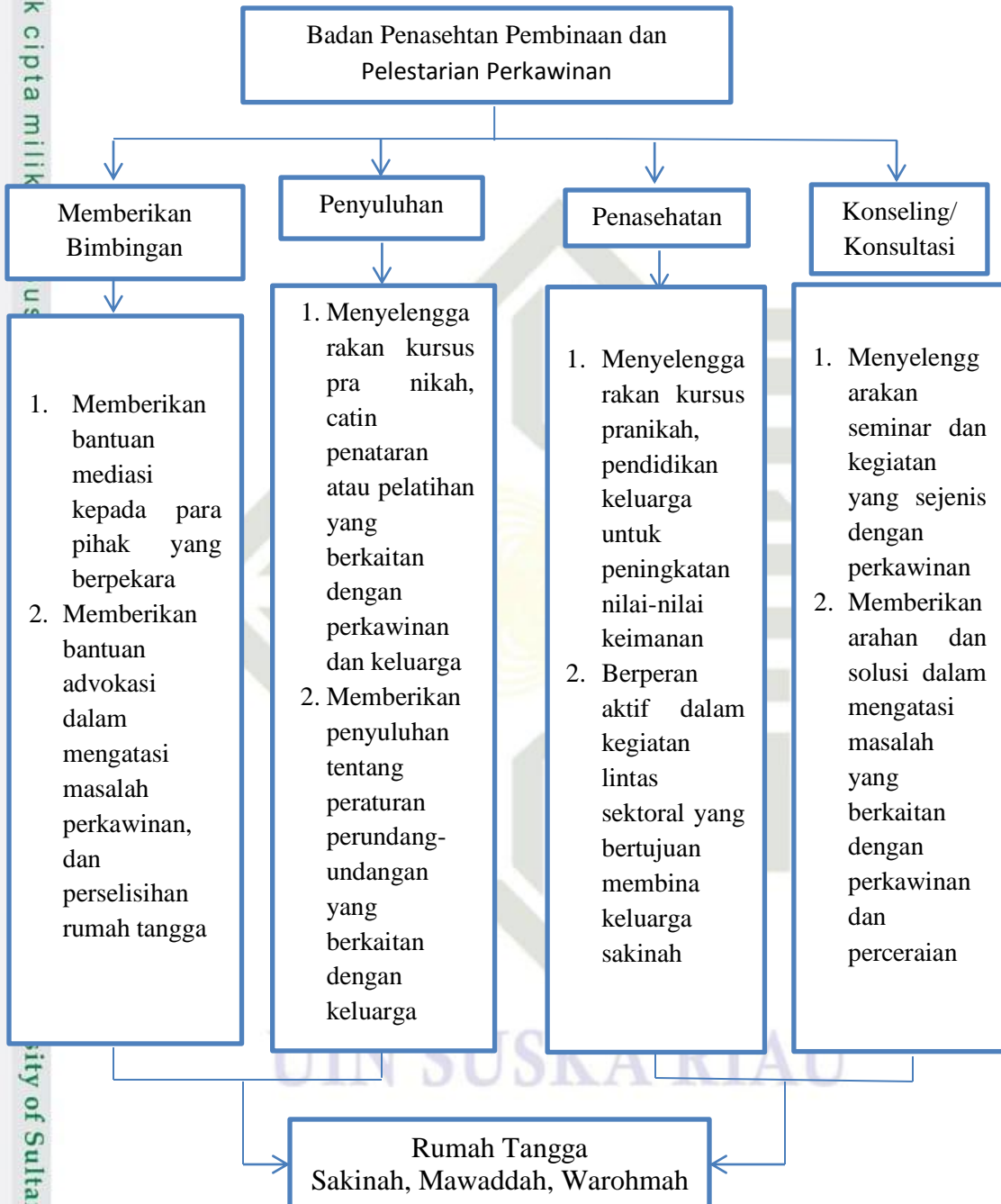
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





2.13 Kerangka Pemikiran



Sumber : Keputusan Musyawarah Nasional BP4 XV Tahun 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah dengan mencari data suatu masalah, diperlukan suatu metode yang bersifat ilmiah yaitu metode penelitian yang sesuai dengan yang akan diteliti. Suatu metode merumuskan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Jadi suatu metode dipilih berdasarkan dan mempertimbangkan keserasian dengan obyeknya serta metode yang digunakan sejalan dengan tujuan, sasaran, variabel, dan masalah yang hendak diteliti. Sedangkan metode penelitian menguraikan secara teknik apa yang digunakan dalam penelitiannya.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu pada Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kecamatan Kunto Darussalam. Penelitian ini dimulai dari pengajuan sudut pada bulan tertentu, kemudian selanjutnya penulisan proposal yang dilakukan pada bulan tertentu hingga dianggap layak untuk diseminarkan.

3.2 Jenis Penelitian dan Sumber Data

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi dengan pendekatan kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan subjek dan objek, baik seseorang, lembaga, masyarakat dan lain sebagainya serta didasarkan atas hasil observasi dan wawancara mendalam yang peneliti lakukan serta memberikan argumentasi terhadap apa yang ditemukan di lapangan dan dihubungkan dengan konsep operasional dan peraturan yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.2.1 Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan dari narasumber yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data primer yang diperoleh dari informan yang menjadi subjek penelitian, berupa informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian, baik melalui observasi maupun wawancara. Data primer ini diperoleh dari :

- a. Melakukan wawancara dengan informan penelitian terkait masalah penelitian Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di Kecamatan Kunto Darussalam.
- b. Melalui observasi lapangan yang dilakukan peneliti pada Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Kunto Darussalam.

3.2.2 Data Sekunder

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data sekunder merupakan pelengkap atau penunjang data primer dikumpulkan dari data yang sesuai. Data sekunder ini meliputi dokumentasi berupa rekaman suara dan foto-foto sebagai bukti penelitiann ini benar dilakukan.

3.3 Informan Penelitian

Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi kepada peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling dimana peneliti memilih key informan dan informan yang peneliti anggap mengetahui tentang permasalahan penelitian. Sebagai key informan yang paling mengetahui bagaimana kondisi keseluruhan dari pelaksanaan program penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) kecamatan kunto darussalam.

Adapun yang menjadi informan yang akan memberikan keterangan tambahan demi mendapatkan data yang utuh dalam penelitian ini yaitu :

Table 3.1
Key Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan / status
1	Drs.Safarudin	Kepala Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kecamatan Kunto Darussalam
2	Jifar Hamdani	Kepala Bidang Konsultasi, Konseling, dan Penasehatan Perkawinan
3	Calon pengantin	1 Pasang
4	Pesrta yang bimbingan	3 Orang
5	Peserta yang konseling	3 Orang
6	Peserta Orang yang Akan bercerai	1 Orang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang direncanakan untuk dilapangan adalah sebagai berikut :

3.4.1 Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktiivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis (Idrus, 2009:101). Pengamatan dalam penelitian ini dapat dilakukan secara terlibat maupun non terlibat. Maksudnya pengamatan terlibat merupakan jenis pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan orang menjadi sasaran penelitian tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktivitas yang bersangkutan.

3.4.2 Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu (Mulyana, 2006:180). Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung merupakan suatu bentuk komunikasi atau percakapan untuk memperoleh informasi. Peneliti akan secara langsung melakukan wawancara dengan pemberi informasi yaitu orang yang dianggap paham dan mengetahui masalah yang akan diteliti dengan menggunakan daftar pertanyaan. Wawancara akan dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disusun penulis sebagai acuan untuk mencari informasi, namun sifatnya tidak mengikat sehingga banyak pertanyaan yang baru muncul ketika wawancara yang terkait

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pelaksanaan penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan di kecamatan kunto Darussalam.

3.4.3 Studi Dokumentasi

Menurut Arikunto (2007:231) dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, arsip, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan data kedalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan data yang ada. Dan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa kualitatif deksriptif data yang dikemukakan oleh sugiono (2005:60). Berikut ini adalah beberapa tahapan yang dipakai untuk menganalisa data :

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang sudah direduksi dapat memberikan gambaran yang tepat, dan dapat membantu peneliti dalam pengumpulan data. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan difokuskan pada pelaksanaan penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) kecamatan kunto darussalam.

b. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif. Informasi yang didapat dilapangan disajikan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedalam teks dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak disesuaikan dengan fakta yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah direduksi dengan tepat dan benar keadaan yang sebenarnya dilapangan.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah semua data berkenaan dengan pelaksanaan penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) kecamatan kunto darussalam. maka ditarik kesimpulan yang bersifat sempurna. Data yang diperoleh juga dapat dikembangkan dengan mengacu pada kerangka pemikiran dan teori-teori yang pendukung yang relevan dengan penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

UIN SUSKA RIAU

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Karakteristik Wilayah

Kecamatan Kunto Darussalam merupakan salah satu Kecamatan dari 16 Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu yang terletak di wilayah timur Kabupaten Rokan Hulu. Luas wilayah Kecamatan Kunto Darussalam adalah $\pm 584,10 \text{ Km}^2$ atau seluas 58,410 Ha yang membawahi 1 satu Kelurahan dan 12 Desa. Berdasarkan pembentukannya batas Kecamatan Kunto Darussalam adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bonai Darussalam
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kepenuhan dan Kecamatan Rambah Samo
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam dan Kabupaten Kampar

4.2 Keadaan Demografi

4.2.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Kunto Darussalam

Penduduk merupakan unsur yang paling penting dalam pembangunan, baik sebagai objek pembangunan maupun sebagai subjek pembangunan itu sendiri. Sebagaimana yang telah diprioritaskan oleh pemerintah bahwa faktor Penduduk merupakan modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan ketetapan tersebut berarti bahwa aspek penduduk akan memberikan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harapan sebagai salah satu sumber potensial yang menggerakkan dan digerakkan dalam proses pembangunan. Penduduk dan wilayah Kecamatan Kunto Darussalam pada 2017 berjumlah 43.716 jiwa. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Kunto Darussalam pada Tahun 2017

No	DESA	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kota Lama	9.709	8.891	18.600
2	Kota Intan	1.618	1.512	3.130
3	Muara Dilam	2.490	2.138	4.628
4	Kota Raya	1.715	1.633	3.348
5	Kota Baru	2.088	1.887	3.975
6	Sungai Kuti	998	889	1.887
7	Pasir Indah	605	543	1.148
8	Pasir Luhur	883	826	1.709
9	Muara Intan	744	616	1.360
10	Bukit Intan Makmur	957	861	1.818
11	Bagan Tujuh	869	754	1.623
12	Intan Jaya	722	649	1.371
13	Tanah Datar	956	829	1.785
	Jumlah	24354	22028	46.382

Sumber : Kecamatan Kunto Darussalam 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu menurut jenis kelamin yang mana laki-laki lebih banyak jumlahnya dari pada jenis kelamin perempuan.

4.2.2 Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Factor tingkat pendidikan memegang peranan penting dalam era pembangunan pada saat sekarang ini. Berkualitasnya mutu pendidikan



© masyarakat akan membawa dampak yang sangat positif terhadap kemajuan dalam wilayah kecamatan tersebut.

Beberapa tahun belakangan ini dapat dilihat bahwa semakin meningkatnya kesadaran masyarakat Kecamatan Kunto Darussalam dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan di Kecamatan Kunto Darussalam pada Tahun 2017

No	Sarana Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SD/MI	3645	11,27 %
2	SMP/MTS	12567	38,852 %
3	SMA/MA	9861	30,49 %
4	Diploma	1056	3,264 %
5	S1/S2	987	3,052 %
6	Lain-lain	4229	13,075 %
Jumlah		32345	100

Sumber : Kecamatan Kunto Darussalam 2017

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan yang paling banyak dimiliki di Kecamatan Kunto Darussalam adalah Sekolah Menengah Pertama/MTS sebanyak 12567 dan yang paling rendah adalah tamatan S1/S2.

Penduduk sebagai prioritas utama dari pembangunan berkembang baik di Kecamatan Kunto Darussalam. Pendidikan perlu di tunjang oleh prasarana yang memadai. Pada umumnya, prasarana pendidikan berupa gedung-gedung sekolah yang ada di Kecamatan Kunto Darussalam boleh dikatakan hamper seluruh nya tersedia. Prasarana pendidikan yang tersedia sudah dapat dikatan telah mencukupi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jumlah gedung-gedung sekolah yang telah mampu untuk menampung sebagian besar penduduk Kecamatan Kunto Darussalam pada usia sekolah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keadaan yang telah disebut diatas ditunjang dengan adanya prasarana pendidikan yang disediakan oleh pemerintah. Untuk mengetahui jumlah prasarana pendidikan di Kecamatan Kunto Darussalam dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3 : Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Kunto Darussalam pada Tahun 2017

No	Sarana Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SD/MI	28	58,33 %
2	SMP/MTS	14	29,17 %
3	SMA/SMK	6	12,5 %
4	Perguruan Tinggi	-	-
Jumlah		48	100

Sumber : Kecamatan Kunto Darussalam 2017

Dari tabel diatas maka dapat ditunjukkan bahwa prasarana pendidikan yang paling banyak adalah SD/MI sebanyak 28 buah, berikutnya adalah prasarana gedung SMP/MTS sebanyak 14 buah, prasarana gedung SMA/SMK sebanyak 6 buah, dan Perguruan Tinggi 0.

4.2.3 Mata Pencaharian Penduduk

Adapun bentuk pencarian atau jenis pekerjaan penduduk yang ada di Kecamatan Kunto Darussalam mayoritas pencarian penduduk adalah petani untuk lebih jelasnya mengenai mata penduduk Kecamatan Kunto Darussalam dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.4 : Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kecamatan Kunto Darussalam pada Tahun 2017

No	Mata Pencaharian	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1	Pertanian	9765	30,19 %
2	Nelayan/Perikanan	201	0,62 %
3	Buruh	7460	23,06 %
4	PNS/Honorir	1005	3,11 %



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5	Pedagang	342	1,06 %
6	Wiraswasta	1303	4,03 %
7	TNI/Polri	20	0,07 %
8	Lain-lain	12249	37,88 %
Jumlah		32345	100

Sumber : Kecamatan Kunto Darussalam 2017

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari sekian banyak jumlah penduduk Kecamatan Kunto Darussalam terdapat 9765 Orang (30,19%) petani, 201 orang (0,62%) sebagai nelayan, 7460 orang (23,06%) sebagai buruh, 1005 orang (3,11%) PNS/Honorer, 342 orang (1,06%) bekerja sebagai pedagang, kemudian 1303 orang (4,03%) sebagai wiraswasta, selanjutnya 20 orang (0,07%) sebagai TNI/Polri, dan 12249 (37,88%) dikategorikan sebagai lain-lain.

4.2.4 Kehidupan Keagamaan

Memeluk agama merupakan hak azazi dasar pada manusia.Kebebasan beragama di Negara Indonesia di jamin didalam batang tubuh UUD 1945 dalam pasal 29.Sikap yang perlu yang dikembangkan dari pasal 29 UUD 1945 tersebut adalah toleransi antar umat beragama, kerukunan umat beragama tidak mencampur adukan kepercayaan.

Dalam wadah Kesatuan Republik Indonesia yang ditangani falsafah Negara pancasila, dikenal ada tiga kerukunan beragama itu adalah :

1. Kerukunan umat beragama dengan seagama
2. Kerukunan umat beragama dengan agama lain
3. Kerukunan umat beragama dengan pemerintah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk melihat pemeluk agama yang tumbuh dan berkembang di kecamatan Kunto Darussalam dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5 Jumlah Pemeluk Agama di Kecamatan Kunto Darussalam pada Tahun 2017

No	Jumlah Pemeluk Agama	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1	Islam	40477	87,29 %
2	Budha	-	-
3	Protestan	5521	11,91 %
4	Katolik	374	0,81 %
5	Hindu	-	-
	Jumlah	46372	100

Sumber : Kecamatan Kunto Darussalam 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pemeluk agama mayoritas adalah beragama islam yaitu sebanyak 40.477 orang. Sedang minoritas adalah beragama protestan yaitu 5.521 orang dn katolik yaitu 374 orang.

Untuk menjalankan ritual keagamaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sangat perlu didukung oleh sarana dan prsarana. Adapun sarana dan prasarana ritual adalah tempat peribadatan. Dimana tempat peribadatan ini selain dari tempat ibadah juga merupakan salah satu saluran yang penting untuk mengkomunikasikan pesan-pesan pembangunan dalam rangka mensosialisasikan suatu pembangunan kepada masyarakat. Banyaknya tempat ibadah di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.6 Jumlah Sarana Ibadah di Kecamatan Kunto Darussalam pada Tahun 2017

No	Sarana Ibadah	Jumlah	Persentase (%)
1	Masjid	37	26,62 %
2	Surau	96	69,06 %
3	Gereja	6	4,32 %
4	Vihara	-	-
5	Pura	-	-
Jumlah		139	100

Sumber : Kecamatan Kunto Darussalam 2017

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 37 masjid dan 96 surau sebagai sarana umat islam untuk beribadah, 6 gereja sebagai sarana ibadah umat Kristen dan katolik.

4.3 Struktur Pemerintahan

4.3.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan

Pelaksanaan pemerintahan wilayah Kecamatan Kunto Darussalam telah melaksanakan atau menerapkan pola maksimal, berdasarkan peraturan daerah Nomor 09 Tahun 2007 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Kecamatan Kunto Darussalam.

Kecamatan Kunto Darussalam telah ditunjuk sebagai Kecamatan dengan pola organisasi maksimal perihal yang sama, telah diusulkan pegawai yang akan menduduki jabatan yang tersedia dalam pola organisasi maksimal dimaksud.

Kecamatan Kunto Darussalam merupakan salah satu dari 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu yang terdiri dari 13 Desa sebagaimana yang telah uraikan diatas. Adapun mengenai struktur organisasi



© dari pemerintahan Kecamatan Kunto Darussalam dapat dilihat pada bagan berikut:

1. Tugas dan Fungsi Camat

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota, dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Kecamatan sebagaimana dimaksudkan diatas dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan tugas tugas Pemerintahan Umum dan Membina Pemerintahan Desa/Kelurahan.
2. Melaksanakan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, pemeberdayaan masyarakat, kesejahteraan social, dan lingkungan hidup.
3. Melakukan Koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan penataan dan pembinaan.
4. Menyusun rencana pembangunan di wilayah kerja kecamatan.

2. Tugas dan Fungsi Perangkat Kecamatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam menjalankan tugasnya Camat dibantu oleh perangkat Kecamatan yang bertanggung jawab pada Camat. Adapun tugas dan fungsi perangkat Kecamatan yaitu sebagai berikut :

A. Sekretaris Kecamatan

1. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur Kecamatan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, sekretaris kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :
3. Menyusun rencana kerja mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan nya.
4. Mengurus dan melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, perlengkapan rumah dan tangga.
5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pemimpin.

B. Seksi Pemerintahan

1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan, kebijakan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan dan membina Pemerintahan Umum, Kependudukan dan Catatan Sipil.
- b. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang merupakan wewenang kecamatan.
- c. Memberikan pelayanan, rekomendasi dan perizinan.
- d. Melaksanakan administrasi kependudukan.
- e. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

C. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

1. Seksi Ketentraman dan ketertiban Pemerintah mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi, dan pelaporan urusan Ketentraman dan Ketertiban.

2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Melakukan koordinasi dan membina kesatuan pelindung masyarakat (LINMAS) di wilayah kerja kecamatan.
- c. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

D. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan, pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat.

2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membina kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- c. Melakukan pengawasan, pembinaan, dan memfasilitasi kegiatan program kesehatan masyarakat;
- d. Mengkoordinasi pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;
- e. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan;

E. Seksi Kesejahteraan Sosial

1. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial.

2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan tugas penanggulangan masalah sosial;
- b. Melakukan pencegahan dan penanggulangan bencana alam;
- c. Melaksanakan koordinasi pembinaan kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- d. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

F. Seksi Lingkungan Hidup



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

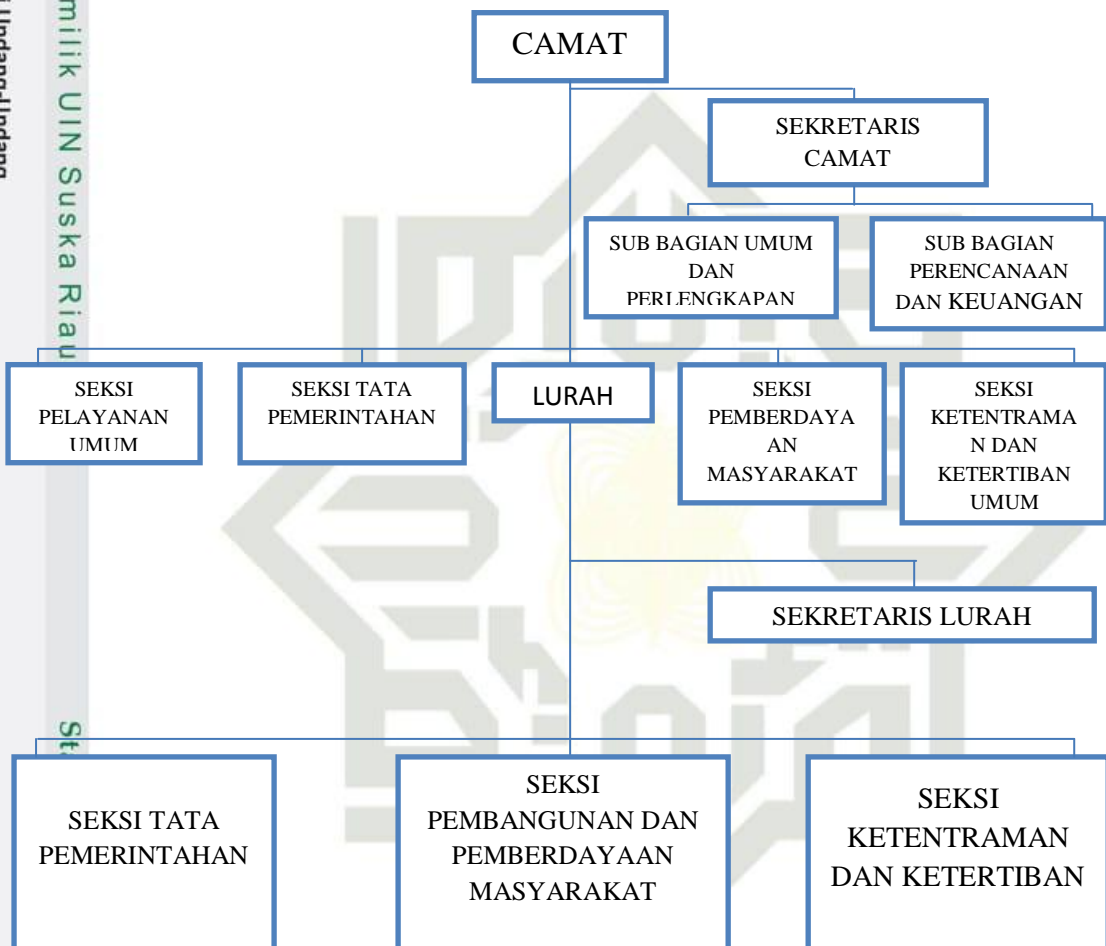
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Seksi lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan urusan lingkungan hidup.
2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Melakukan pencegahan atas pengambilan sumberdaya alam tanpa izin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
 - b. Melakukan koordinasi dalam pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

4.4 © Struktur Organisasi Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan

Hulu Tahun 2017

Gambar 4.1



Sumber : Kecamatan Kunto Darussalam Tahun 2017

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4.5 © Sejarah Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Kunto Darussalam

Salah satu tugas Kementerian Agama adalah untuk melaksanakan UU nomor 22 tahun 1946 tentang pengawsan dan pencatatan nikah, talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama islam. Tugas Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam UU tersebut diatas hanyalah mengawasi dan mencatat peristiwa pernikahan, talak, dan rujuk, tidak termasuk bagaimana upaya untuk memelihara, merawat, dan menjaga kelestarian pernikahan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat, sehingga hal itu terserah pasangan masing-masing bagaimana caranya melakukan hal tersebut. Dengan kata lain bahwa Kementerian Agama (Departemen Agama) tidak mempunyai tugas langsung untuk menangani dan memberikan jalan keluar kasus-kasus yang terjadi dalam rumah tangga.

Sebaimana upaya untuk meningkatkan kualits keluarga, pada tahun 1950-1954 telah diadakan penelitian yang hasilnya menyatakan bahwa dari pernikahan yang telah dilaksanakan pada tahun tersebut hamper 60% diantaranya cerai. Melihat kenyataan seperti ini pejabat dilingkungan Kementerian Agama dan para tokoh masyarakat merasa perlu didirikan suatu lembaga penasihatian perkawinan yang dapat memberikan penasihatian untuk memberikan jalan keluar terhadap kasus-kasus yang terjadi didalam keluarga.

Dari maksud tersebut berdirilah lembaga penasehatan perkawinan di beberapa kota besar di pulau Jawa, seperti di Jakarta, Bandung, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Yogyakarta yang kemudian di persatukan menjadi Badan Penasehat Penyelesaian Perceraian (BP4). Padakeempatan konperensi Dinas Departemen Agama yang ke VII tanggal 25 s/d 30 januari 1961 di Cipayung di umumkan bahwa BP4 yang bersifat nasional telah berdiri tanggal 3 januari 1960 dan sejak saat itulah berlaku anggaran dasar dan dana anggaran rumah tangga yang baru. Tujuan didirikan BP4 adalah untuk mempertinggi kualitas perkawinan, mencegah perceraian sewenng-wenang dan mewujudkan rumah tangga yang bahagia sejahtera memnurut tuntunan agama islam.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 1961 ditetpkan bahwa Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai satu-satunya badan yang bergerak dalam bidang penasihatn perkawinan, talak, rujuk, dan upaya untuk mengurangi angka perceraian yang terjadi di Indonesia. Kepetusan Menteri Agama tersebut kemudian diperkuat dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977 tentang penegasan pengakuan Badan penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) pusat.

Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kunto Darussalam berdiri sejak berdirinya KUA Kecamatan Kunto Darussalam pada tahun 1965. BP4 Kecamatan Kunto Darussalam baru di aktifkan disebabkan kurangnya Sumber Daya Manusia yang menyelesaikan permasalahan mengenai BP4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prosedur pelayanan konsultan penasehatan perkawinan dan keluarga bagi calon pengantin BP4 Kecamatan Kunto Darussalam :

1. Datang dan mendaftar di KUA
2. Penuhi panggilan KUA sesuai jadwal
3. Akan diberikan pembekalan hidup berumah tangga.

Faktor kebutuhanlah yang mewujudkan lembagaini, seiring dengan berjalannya waktu dan semakin berkembangnya suatu negara pada waktu itu BP4 disebut sebagai Badan Penasehat Perkawinan dan Perceraian kemudian diubah menjadi Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Dalam hal ini BP4 mempunyai tugas yaitu sebagai badan yang menangani masalah perkawinan dan perselisihan rumah tangga, badan ini tidak menangani masalah perceraian karena masalah perceraian di tangani langsung oleh PA (Pengadilan Agama).

4.6 Visi Dan Misi Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarin Perkawinan (BP4) Kecamtan Kunto Darussalam

Visi dan Misi Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah sebagai berikut :

- a. Visi Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestrian Perkawinan (BP4) “Terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah sebagai basis kehidupan masyarakat yang sejahtera secara fisik material dan mental spiritual”.
- b. Misi Bdan Penasihatn Peembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi
2. Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.

4.7 Kegiatan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Kunto Darussalam

Kegiatan yang dilaksanakan oleh BP4 adalah sebagai berikut :

1. Konsultasi Perkawinan

Konsultasi perkawinan dilaksanakan di ruangan konsultasi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau Kantor Urusan Agama (KUA) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini dilakukan karena sampai saat ini fungsi BP4 belum dapat dilepaskan dari tugas KanKemenag Rokan Hulu.

2. Kursus Pranikah

Kursus pranikah sesuai dengan pedoman pelaksanaan kursus pranikah sudah dilaksanakan berdasarkan surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu yang dibuat oleh Kepala Seksi Bimas Islam.

4.8 Program Kerja Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Kunto Darussalam

A. Program Kerja

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menyelenggarakan kursus calon pengantin
2. Mengembangkan pembinaan keluarga sakinah dengan memberikan
3. penyuluhan kepada masyarakat
- B. Bidang Pendidikan Keluarga Sakinah dan Pengembangan SDM
 1. Menyempurnakan buku pedoman melaksanakan pendidikan keluarga sakinah.
 2. Menjadikan pendidikan keluarga sakinah sebagai upaya.
 3. pemahaman keimanan dan ketakwaan.
 4. Menyiapkan kader motivator keluarga sakinah.
 5. Menyelenggarakan kursus calon pengantin.
- C. Bidang Konsultasi Perkawinan dan Keluarga
 1. Meningkatkan pelayanan konsultasi hukum dan penasehatan perkawinan.
 2. Mengupayakan rekrutmen tenaga profesional di bidang psikologi, agama, hukum, pendidikan, sosiologi, antropologi.
 3. Menyusun pola pengembangan SDM yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan BP4.
 4. Menyelenggarakan konsultasi jodoh.
- D. Bidang Penerangan
 1. Mengadakan diskusi, ceramah, seminar/temu karya dan kursus serta penyuluhan tentang :
 - a. Pembinaan keluarga sakinah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Undang-undang perkawinan hukum munakahat kompilasi hukum Islam.
 - c. Pendidikan keluarga sakinah.
 2. Meningkatkan kegiatan penerangan dan motivasi pembinaan keluarga sakinah melalui media cetak dan media media tatap muka.
 3. Mengusahakan agar majalah perkawinan dan keluarga dapat disebar luaskan kepada masyarakat.
- E. Bidang Penelitian dan Pengembangan
1. Melakukan penelitian tentang kasus-kasus perkawinan dan keluarga.
 2. mengadakan penelitian tentang perubahan tatanan nilai sosial dan pengaruhnya terhadap kehidupan perkawinan dan keluarga.
 3. Mengupayakan pengembangan metode dan sistem yang lebih cepat dalam rangka meningkatkan mutu penasehat perkawinan dan pendidikan keluarga sakinah.
 4. Mengadakan evaluasi dan penilaian BP4
- F. Bidang Pembinaan Keluarga Sakinah
1. Melakukan advokasi di berbagai bidang dan upaya mewujudkan keluarga sakinah.
 2. Menyusun dan menetapkan konsep dasar kriteria dan prosedur pemilihan keluarga sakinah.
 3. Menyelenggarakan pemikiran dan pengukuhan keluarga sakinah teladan setiap tahun.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

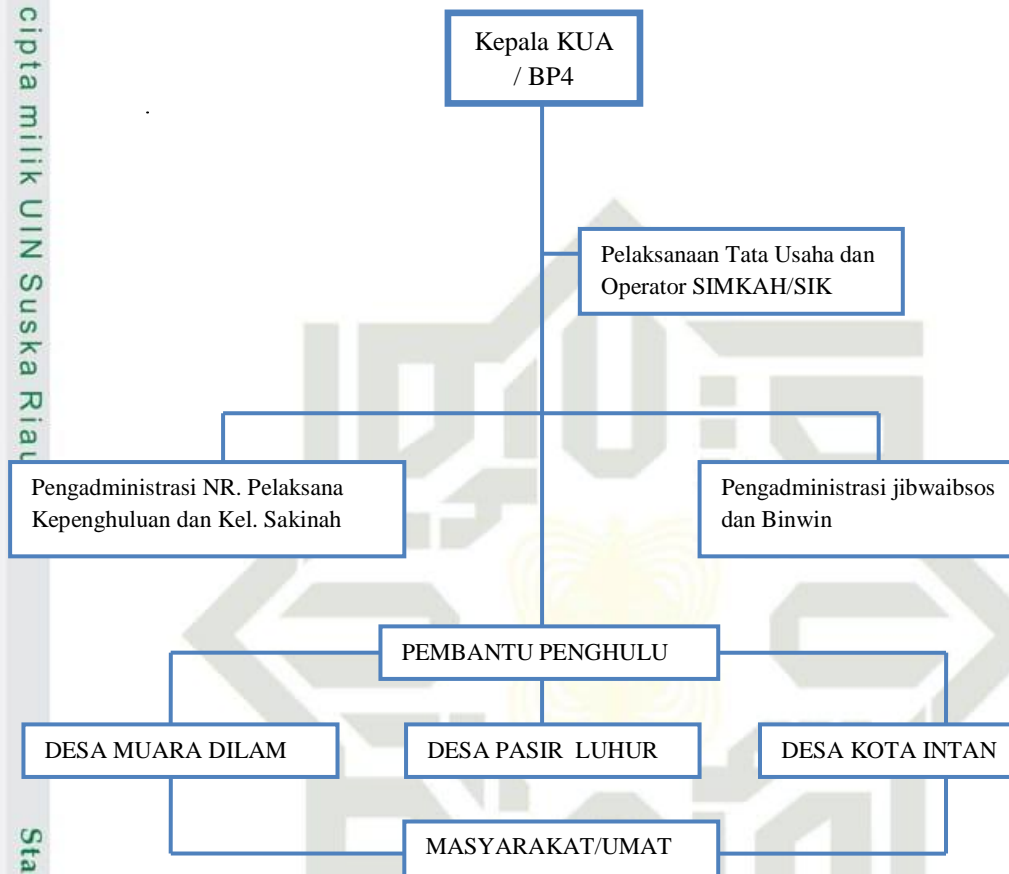
© G. Bidang Usaha

1. Mengupayakan alokasi anggaran dari DIKS NR, APBN dan APBD untuk mendukung program BP4 Kecamatan Kunto Darussalam.
2. Melakukan usaha produktif untuk meningkatkan kemampuan keuangan dan anggaran organisasi.



4.9 Struktur Organisasi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Kunto Darussalam

Gambar 4.2



Sumber : Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kunto Darussalam 2018

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai Peran Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Kunto Darussalam Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

Dilihat dari empat (4) indikator dari keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) XV Tahun 2014 Nomor : 260/2-P/BP4/VIII/2014. Adapun indikator dalam penelitian ini adalah memberikan bimbingan, penyuluhan, panasihat, dan konseling.

1. Memberikan bimbingan terhadap pihak yang menikah sudah dilakukan oleh BP4 dengan cara memberikan nasihat kepada pihak yang menikah namun masih terdapat juga pihak yang memutuskan untuk bercerai. Masyarakat yang mendapatkan bimbingan adalah masyarakat yang sudah terdaftar sebagai calon pasangan suami istri di kantor urusan agama (KUA)
2. Penyuluhan terhadap calon pengantin (catin) sudah diberikan dengan cara memberikan materi yng disampaikan oleh pengurus BP4 agar mereka semua yang mengikuti bertambah ilmunya tentang perkawinan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan hidup berumah tangga, mengerti bagaimana cara agar rumah tangga tersebut tidak terjadi perselisihan dan tidak terjadi lagi masalah dalam rumah tangga.

3. Penasihatan terhadap peserta pranikah sudah diberikan dengan cara memberikan nasihat-nasihat dan pembelajaran yang sudah terdapat dalam materi yang disampaikan oleh pengurus Badan Penasihatian Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Kunto Darussalam kepada peserta pranikah atau disebut pasangan yang mendaftar sebagai pasangan suami istri.
4. Konseling kepada pasangan pengantin sudah diberikan dengan cara memberikan solusi, nasehat, atau ceramah ceramah kepada pasangan yang hendak menikah agar terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan dalam rumah tangga.

Badan Penasihatian Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) memang benar adanya di Kecamatan Kunto Darussalam sebagai wadah tempat meningkatkan mutu perkawinan agar terhindar dari perbuatan perceraian. Menurut penulis BP4 Kecamatan Kunto Darussalam sudah menjalankan tugas dan fungsi nya secara administrative tetapi belum berjalan secara maksimal sebagaimana yang di inginkan dalam musyawarah Nasional BP4. Yaitu memberikan bantuan mediasi kepada pihak yang berpekar di pengadilan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama dan Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di peradilan agama

6.2 Saran

Adapun saran untuk Badan Penasihatian Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan peneliti selanjutnya sebagai berikut :

1. Badan Penasihatian Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Kunto Darussalam di harapkan lebih baik lagi serta memiliki kemampuan SDM yang bisa dibanggakan dalam menjalankan fungsi dan tugas untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah waromah agar dapat mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Kunto Darussalam
2. Kepada petugas Badan Penasihatian Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai mediator perkawinan bila perlu melibatkan andil masyarakat atau orang yang berpengaruh di kehidupan social masyarakat dan memiliki tempat tersendiri seperti sarana dan prasarana yang memadai.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk meneliti tentang penyebab sesungguhnya terkait masalah angka perceraian yang semakin tahun semakin meningkat



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Ansori. 2011. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta. UII Press.
- Agoes Dariyo. 2003. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.
- Arso Sasroatmojo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: 1975.
- Dr. Syarifuddin, Muhammad, SH., M.Hum, dkk. 2014. *Hukum Perceraian*. Jakarta Sinar Grafika.
- Erma 1999. *Hukum Perceraian*, Bandung, Citra utama.
- New Merah Putih, 2009. UU Perkwinan. Yogyakarta. Galangpress.
- Putri Novita Wijaya. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perceraian dalam Perkawinan*. Skripsi. Semarang: Fakultas Psikologi, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang: Tidak diterbitkan.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers Jakarta.
- Soimin, Soedharyo, SH. 2010. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Sugiono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2012. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Surwadi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Renika Cipta.
- Jurnal dari Nurlia Zulfatun Nisa dengan berjudul, “Peran Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Kasus Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipayung Jakarta Timur 2013”
- Jurnal oleh Haris Hidayatulloh dan Laily Hasan dengan berjudul, “Eksistensi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam mewujudkan keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang 2016”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurnal oleh Wildana Setia Warga Dinata dengan berjudul, “Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember 2015”.

Jurnal oleh Zahrotul Hamidah dengan berjudul, “Peran Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Klojen Kota Malang) 2019”.

Jurnal oleh Zuhri dengan berjudul, “Peranan BP4 Dalam Mengendalikan Perceraian Di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Kab. Gresik 2016”.

AD/RT Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/2014.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. 11/491 Tahun 2009.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Foto Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunto Darussalam)



(Foto Bersama pengurus BP4 dan KUA Kecamatan Kunto Darussalam 01/07/2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Foto ruang tempat pelayanan administrasi pernikahan dan penataran)



(Foto Bersama staff Khusus K U A Kecamatan Kunto Darussalam 09/07/2019)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ROKAN HULU
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
 Email : kuakuntodarussalam@gmail.com
 Jalan Masjid No. 2 Telp. (0762) 62558 Kota Lama Kode Pos : 28456

FORMULIR PENDAFTARAN NIKAH DAN RUJUK
 NOMOR :

TANGGAL NIKAH :
 NAMA CALON SUAMI :
 NAMA CALON ISTRI :
 WAKIL NIKAH :
 TEMPAT NIKAH :
 MASKAWIN :
 HARI/JAM PENASEHATAN (BP4) :

PERSYARATAN ADMINISTRASI

1. SURAT KETERANGAN UNTUK NIKAH (N1) :
2. SURAT KETERANGAN ASAL USUL (N2) :
3. SURAT PERSETUJUAN MEMPELAI (N3) :
4. SURAT KETERANGAN ORANG TUA (N4) :
5. SURAT IZIN ORANG TUA/BAGI BELUM BERUSIA 21 TAHUN (N5) :
6. FOTO COPY IHAZAH/AKTE KELAHIRAN :
7. FOTO COPY KTP/KARTU KELUARGA (KK) :
8. SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENIKAH :
9. SLIP SETORAN BANK/ATM BERMATERAI 6000 :
10. IMUNISASI TT1 DARI PUSKESMAS :
11. SURAT KET. KEMATIAN SUAMI/ISTRI BAGI JANDA/DUDA (N6) :
12. SURAT REKOMENDASI PINDAH NIKAH :
13. AKTA CERAI/TALAK ASLI DARI PENGADILAN AGAMA BAGI JANDA/DUDA :
14. IZIN PENGADILAN AGAMA BAGI CATIN DIBAWAH UMUR :
15. IZIN POLIGAMI DARI PA, BAGI YANG BERISTRI LEBIH DARI SATU :
16. REKOMENDASI DARI CAMAT BAGI NIKAH KURANG DARI 10 HARI KERJA :
17. IZIN ATASAN BAGI ANGGOTA TNI/POLRI :
18. SURAT KETERANGAN MASUK ISLAM BAGI MUALLAF :
19. FOTO COPY BUKU NIKAH ORANG TUA WANITA :
20. FOTO COPY WALI NIKAH JIKA AYAH KANDUNG SUDAH TADA :
21. PAS PHOTO 2 X 3= 4 LEMBAR DAN 4 X 6=1 LEMBAR :
22. SURAT KETERANGAN KEHENDAK RUJUK (R1) :

PENGHULU/PEMBANTU PENGHULU :
 YANG MENERIMA :

KOTA LAMA,/2019
 CALON MEMPELAI/WALI/WAKIL WALI
 YANG MENDAFTARKAN :

(formulir pendaftaran nikah dan rujuk KUA Kecamatan Kunto Drussalam)

BP4
PENASEHATAN, PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN
KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM

HARI :
 TANGGAL : M/..... H

No	Identitas	Calon Suami	Calon Istri
01	Nama Lengkap/Alias		
02	Tempat/Tgl. Lahir		
03	Alamat		
04	Pendidikan Terakhir		
05	Pekerjaan		
06	Warga Negara	INDONESIA	INDONESIA
07	Agama	ISLAM	ISLAM
08	Perkawinan yang ke		
09	Nama Orang Tua Laki-laki		
10	Nama Orang Tua Perempuan		
11	Mulai Berkenalan		
12	Perjanjian Perkawinan		
13	Alamat Orang Tua		
14	Persetujuan Perkawinan	YA	YA
15	Jumlah Bersaudara/anak ke		
16	Jumlah anak bagi Duda/Janda		
17	Mengetahui Shalat		
18	Penghasilan sebulan		
19	Hobby Menabung Ya/Tidak		
20	Tempat/Tgl. Pernikahan		
21	Wali Nasab/Hakim		
22	Mas kawin/ Mahar		
23	Tujuan Perkawinan		
24	Imunisasi TT1 dan TTII		
25	Baca Tulis Al-Qur'an	BISA / TIDAK BISA	BISA / TIDAK BISA
26	Pengetahuan Agama	KURANG/ CUKUP/BAIK	KURANG/ CUKUP/BAIK
27	Catin perempuan		SDH HAMIL/BLM HAMIL/PERAWAN/TIDAK PERAWAN

Kota Lama,20...

Calon Suami :
 Calon Istri :

(.....) Penasehat, (.....)

(Formulir Penataran BP4 Kecamatan Kunto Darussalam)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Foto Balai Nikah KUA Kecamatan Kunto Darussalam)



(Foto Pengadilan Agama Pasir pengaraian)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Foto bersama pasangan baru menikah yang mendapat kan bimbinga 060719)



(Foto bersama pasangan telah menikah dan yang mendapatkan bimbingan)



(Foto bersama pasangan telah menikah dan mengikuti penataran 05/07/2019)



(Foto bersama pasangan akan menikah dan peserta penataran 14/07/2019)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Foto Bersama pasangan yang telah bercerai 03/07/2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Foto Bersama pasangan telah menikah dan mengikuti penataran 11/07/2019)



(Foto Bersama pasangan baru menikah dan mengikuti penataran 10/07/2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



(Foto bersama pasangan yang menikah dan diberikan konseling 20/07/2019)

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



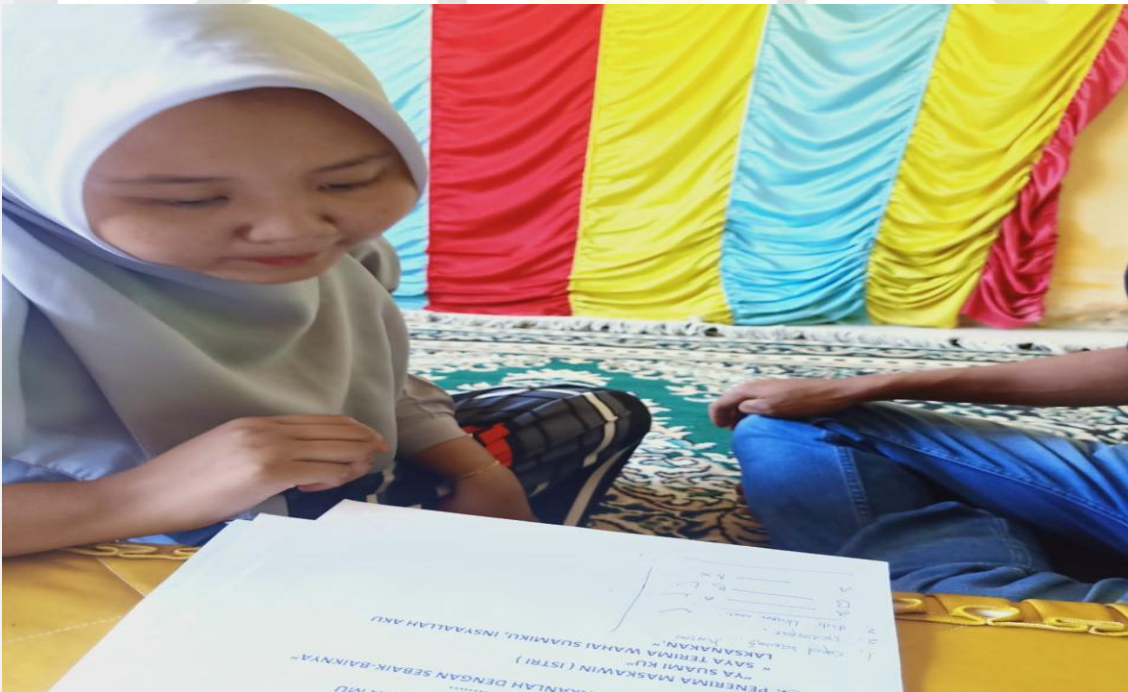
(Foto bersama pasangan yang akan menikah dan diberikan konseling 23/07/2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Foto saat memberikan penataran dan nasehat-nasehat pernikahan oleh Pak KUA)



(Foto Saat Penataran yang diberikan oleh BP4)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/3382/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Bimbingan Skripsi

Pekanbaru, 14 Mei 2019 M
9 Ramadhan 1440 H

Kepada
Yth. Dr. Rodi Wahyudi, S. Sos, M. Soc, Sc
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

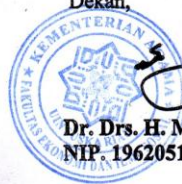
Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Viki Rahmat Illahi
NIM : 11575104925
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "Peran Kantor Urusan Agama dalam Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan di Kabupaten Rokan Hulu". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudarasebagai pembimbingdalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/22854
 TENTANG



032010

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/3379/2019 Tanggal 14 Mei 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

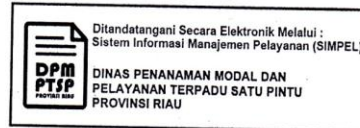
1. Nama : **VIKI RAHMAT ILLAHI**
2. NIM / KTP : **11575104925**
3. Program Studi : **ADMINISTRASI NEGARA**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PENASEHATAN, PEMBINAAN, DAN PELESTARIAN PERKAWINAN DI KABUPATEN ROKAN HULU**
7. Lokasi Penelitian : **BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN KEC. KUNTO DARUSSALAM**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 16 Mei 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hulu
 Up. Kaban Kesbang dan Linmas di Pasirpangraian
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
- ④ Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755
Kode Pos : 28557 Email : dpmptsp@rokanhulukab.go.id Website : http : //dpmptsp.rokanhulukab .go.id

REKOMENDASI

NOMOR:503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/175

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu, setelah membaca Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/22854 tanggal 16 Mei 2019 tentang Rekomendasi Pelaksanaan Riset / PraRiset dan pengumpulan Data untuk bahan **Skrripsi**, dengan ini dapat diberikan rekomendasi kepada :

Nama	: VIKI RAHMAT ILLAHI
Nomor Induk Mahasiswa	: 11575104925
Jurusan	: Administrasi Negara
Jenjang	: S-1 (Strata 1)
Judul Penelitian	: Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu
Lokasi Penelitian	: 1. Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) 2. Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak Melakukan Kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset dan Pengumpulan Data ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini. Terima Kasih



Ditetapkan di : Pasir Pengaraian
Pada Tanggal : 22 Mei 2019

an-BUPATI ROKAN HULU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU
Ridarmanto, S.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 197210061992011002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hulu .
2. Pengadilan Agama Pasir Pengaraian
3. Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kunto Darussalam
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau
5. Yang bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ROKAN HULU
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
 JALAN MASJID No. 2 Telp. (0762) 62559 KOTA LAMA

Kode Pos : 28456

SURAT KETERANGAN

Nomor : 001/ Kua.04.10/BA.04/ VIII /2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs.H.Safaruddin P.
 Nip : 19680704 199603 1 001
 Jabatan : Kepala KUA

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Viki Rahmat Illahi
 NIM : 11575104925
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Jurusan : Administrasi Negara
 Jenjang : S1
 Alamat : Jln. Swead

Telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunto Darussalam bagian Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan mulai bulan July 2019, dengan judul : "PERAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENGURANGI TINGKAT PERCERAIAN DI KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM KABUPATEN ROKAN HULU".

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Kotalama, 23 Agustus 2019
 Kepala KUA

Drs.H.Safaruddin P.
 NIP.196807041996031001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



VIKI RAHMAT ILLAHI, di lahirkan di kota lama, 03 Oktober 1996 dari pasangan Ayahanda Bazaruddin dan Ibunda Murniati. Merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Dengan pendidikan formal pada SD Negeri 030 Pekanbaru dan tamat pada tahun 2008 di SD Negeri 030 Pekanbaru, setelah itu melanjutkan pada SMP Negeri 1 Kunto Darussalam dan tamat pada tahun 2014 di SMA Negeri 1 Kunto Darussalam, setelah itu melanjutkan kuliah di UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Administrasi Negara S-1. Penulis mengikuti ujian munaqasyah pada tanggal 27 September 2019 dengan judul *“Peran Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu”* dan dinyatakan Lulus.

UIN SUSKA RIAU